

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**Rekayasa Model Alternatif *Corporate Social Responsibility*
berbasis *Access Control* Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa
Lahan Perkebunan**

Tahun ke 1. dari rencana 3 tahun

Dr. Istislam SH.,M.Hum	NIP.196208231986011002
Abdul Madjid, SH, MH	NIP.195901261987011001
Imam Koeswahyono, SH., MHum	NIP.195710211986011002
Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH	NIP.197703052009122001

Dibiayai oleh :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 295/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
November 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Rekayasa Model Alternatif *Corporate Social Responsibility*
Peneliti/Pelaksana berbasis *Access Control* Sebagai Instrumen Penyelesaian
Sengketa Lahan Perkebunan
Nama Lengkap : Dr. Istislam, SH, M.Hum.
NIDN : 0023086206
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081233006337
Alamat surel (e-mail) : abulmadjid59@gmail.com
Anggota (1)
Nama Lengkap : Abdul Madjid, SH, MH
NIDN : 0026015906
Perguruan Tinggi Anggota (2) : Universitas Brawijaya
Nama Lengkap : Imam Koeswabyono, SH, Mhum.
NIDN : 0021105701
Perguruan Tinggi Anggota (ke 3) : Universitas Brawijaya
Nama Lengkap : Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH
NIDN : 0005037710
Perguruan Tinggi Institusi Mitra (jika ada) : Universitas Brawijaya
Nama Institusi Mitra : PT. Pagilaran
Alamat : Jl. Faridan M. Noto 11 Yogyakarta
Penanggung Jawab : Bapak Rahmad Gunardi
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 85.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 300.000.000,00



(Dr. Suhabudin, SH, MH)
NIP. 09591216 198503 1 001
002

Malang, 30 November 2013

Ketua,

(Dr. Istislam, SH, MHum)
NIP. 19620823 198601 1



Menyetujui,
Ketua LPPM UB

(Prof. Dr. I. Siti Chuzaei, MS)
NIP. 0930514 198002 2 001

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah perkebunan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat dengan menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian natura setidaknya terbukti bisa menyelesaikan masalah di beberapa tempat di Jawa Timur. Kendala yang muncul dari penggunaan CSR sebagai penyelesaian sengketa lahan adalah tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik baru. Tulisan ini memberikan tawaran model CSR berbasis Access Control dalam bentuk penyertaan saham (inbreng) untuk meminimalisasi kendala CSR dalam penyelesaian sengketa tanah perkebunan. Strategi penyelesaian sengketa lahan perkebunan dengan menggunakan konsep CSR berbasis Access Control tidak dapat disamakan antara satu kasus dengan kasus yang lain karena pengelolaan, sistem manajemen, resiko masing-masing perkebunan berbeda sesuai situasi dan kondisi.

Keywords : Konflik Pertanahan, Perkebunan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Akses Kontrol

ABSTRACT

Settlement plantation land ownership disputes involving the company and the community by using the Corporate Social Responsibility (CSR) for the provision of natura at least shown to resolve the problem in some places in East Java. Constraints that arise from the use of CSR as a settlement of land disputes is the absence of accountability and transparency from companies that could potentially lead to new conflicts. This paper provides offer-based Access Control model of CSR in the form of shares of stock (inbreng) to minimize the constraints of CSR in the plantation land disputes. Estates dispute resolution strategy using the concept of CSR-based Access Control can not be compared from one case to another case because of the management, system management, risk each farm is different according to the situation and condition.

Keywords : land Dispute, Plantation, Corporate Social Responsibility, Access Control

RINGKASAN

Tulisan ini mencoba mempertautkan antara konflik tanah khususnya tanah perkebunan dengan upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan, akademisi atau peneliti dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai alternatif solusi sengketa tanah khususnya tanah perkebunan.

Tujuan khusus penelitian ini ada empat. *Pertama*, melakukan identifikasi model kebijakandan implementasi CSR yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan perkebunan. *Kedua*, penelitian ini juga akan digunakan untuk mengukur sejauh mana efektifitas pelaksanaan model CSR yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam penyelesaian sengketa lahan. *Ketiga*, membangun model kebijakan dan implementasi CSR melalui pengembangan model *Access Control* sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian sengketa lahan yang ada di daerah perkebunan. *Keempat*, menjadi input bagi pemerintah terhadap pengaturan CSR yang berbasis *Access Control*. Dengan dihasilkannya data berbasis penelitian tentang efektifitas CSR dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pengaturan kebijakan CSR di level daerah.

Keutamaan dari penelitian ini selain untuk meminimalisir penyelewengan CSR juga untuk menciptakan model CSR berbasis *Access Control* dimana kebijakan CSR yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian akan difokuskan di 2 Provinsi di Indonesia, dengan perincian : Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Batang, Kota dan Kabupaten Semarang dan Kota Jogjakarta. Selanjutnya penelitian juga akan diadakan di Provinsi Jawa Timur, dengan pusat penelitian di Kabupaten dan Kota Blitar.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Rekayasa model alternatif corporate social responsibility berbasis access control sebagai instrumen penyelesaian sengketa lahan perkebunan. Ini dilaksanakan guna untuk menyusun alternatif penyelesaian sengketa lahan perkebunan dan CSR seperti apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lahan pertanian. Berangkat dari hasil penelitian ini dapat memetakan kasus sengketa lahan perkebunan memiliki perbedaan antara kasus yang satu dengan yang lain. Kasus sengketa lahan perkebunan setiap tahun selalu meningkat, salah satu contohnya kasus Mesuji.

SUMMARY

This paper attempts to connect the conflicts, land, especially plantation with the efforts made by stakeholders including government, state-owned enterprises, companies, academics or researchers with corporate social responsibility (CSR) as an alternative solution to land disputes especially land estates.

They were four specific aims of this study. First, the identification and implementation of CSR policy model that has been developed by plantation companies. Second, this study will also be used to measure the extent to which the effectiveness of the implementation of CSR models of plantation land in dispute resolution. Third, build a model and implementation of CSR policies through the development of access control models that can be used as an alternative dispute resolution in the area of plantation land. Fourth, it is becomes the input for government for setting CSR-based Access Control. With generates a data-based research on the effectiveness of CSR in dispute resolution plantations, the government could conduct an evaluation of the CSR policy settings at the local level

The virtue of this study in addition to minimizing the diversion of CSR also to create a model-based Access Control CSR CSR policy which generated accountable and transparent so it can be used as an instrument in dispute resolution plantations.

The method used in this study is a qualitative research method. Location of the study will be focused in two provinces in Indonesia, with the details: Central Java Province, which includes the Batang, the City and County of Semarang and Jogjakarta. Further research will also be held in East Java Province, with research centers in the District and the city of Blitar.

From the results of this study concluded, Engineering alternative model of corporate social responsibility based access control as an instrument of dispute resolution plantations. This is done in order to draw up an alternative dispute resolution and CSR plantations as what can be used to resolve land disputes pertanian. Berangkat of the results of this study can map dispute plantations have differences between cases with each other. Plantation land dispute cases is increasing every year, one example Mesuji case.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sodiki dkk.,2001/2002., *Laporan Hasil Penelitian, Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan*, Konsultan Panitia Khusus Komisi A DPRD, Tidak Dipublikasikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
2. Agus Pakpahan.,2000., *Perandan Kontribusi Perkebunan Bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Makalah Seminar Pertanahan (Perkebunan), DPRD Jawa Timur, 25 November, Surabaya, Mimeo
3. Amelia Sri Kusuma Dewi, Toyib Sugianto dan Imam Koeswahyono, 2004, *Permohonan Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha Asal Hak Erfpacht PT, Perkebunan Sumbersari Gajahyana di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unibraw Malang.
4. Agustin Nugraheni, Toyib Sugianto dan Imam Koeswahyono, 2005, *Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Bekas Hak Erfpacht Perkebunan Benar Merangkak Antara PT, Perkebunan Tiengkhek Dengan Masyarakat (Studi di Perkebunan Benar Merangkak, Desa Sidorame Kecamatan Duku Kabupaten Blitar)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.
5. Arif dan Awan Puryadi, 2002. *Perebutan Kuasa Tanah*, Cetakan Pertama, Lapperu Pustaka Utama, Yogyakarta.
6. Ian Zammit, 2003, *Development At Risk*, South Centre & United Nations Research Institute For Social Development, Geneve.
7. Bahrul IImi Yakup.,2012., *Mengapa Rakyat Merusak Aset BUMN Perkebunan 2*, dalam KOMPAS, 31 Juli, hlm.7
8. Bedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana (Editor).,2001. *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan RACA Institute, Jakarta
9. Ian Z. Tamanaha.,2005., *A General Jurisprudence of Law and Society*. Cetakan Kedua, Oxford University Press, New York
10., 2001. *Socio Legal Positivismand a General Jurisprudence*.Oxford Journal of Legal Studies, Vol 21 No.1 Oxford University Press

- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung PT. Aditya Bakti.
- Dianto Bachriadi, dkk., 1997, *Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Reforma Agraria*, KPA Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Endang Suhendar, 1994, *Pemetaan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat*, Cetakan I, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Franz von Benda Beckmann.(Eds),2006, *Changing Properties of Property*, Berghen Book, Oxford, New York.
- Gunawan Wiradi, 2000, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Cetakan Pertama, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamam Koeswahyono dan Tunggul Anshari Setianegara,2000, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Universitas Malang Press, Malang
- ,2007., *Konflik Agraria di Jawa Timur dan Kemanfaatannya Untuk Pembelajaran Socio-Legal di Fakultas Hukum* dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum Volume 36 No.3 Juli-September, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Hendrik Budi Untung,2008., *Corporate Social Responsibility*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Islam,dkk, 2000, *Implementasi Model Penyelesaian Kasus Tanah Perkebunan Akomodatif Pada Kasus Tanah Banongan Situbondo*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu, Unibraw.
- Mesuf Irijanto, 2001, *Isu-isu Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta*, Insan Cendekia Press.
- Soentjaringrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- KPA Bandung, 2001, *Toward Agrarian Reform in Indonesia*, KPA Bandung
- Satria SW Sumardjono, 1982, *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Cetakan Pertama, Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Melody Kemp., 2001., Corporate Social Responsibility in Indonesia Quixotic Dream or Confident Expectation?, Technology, Business and Society Paper No.6, December, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva

Muhammad Fauzan., 2010., Penerapan Access Control Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional di Ladang Minyak Duri, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.7 No. 1 Mei 2010

Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN XII) Laporan Sumber dan Realisasi Penggunaan Dana Bina Lingkungan PTPN XII (Tidak Dipublikasikan)

Pinky Chrisantini., 2007., Berawal Dari Tanah, Melihat Ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah, Cetakan Pertama, Yayasan Akatiga, Bandung

Rachmad Safa'at., 2008., Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi, Cetakan Pertama, In-Trans, Malang

Reza Banakar dan Max Travers (Eds), 2005. Theory and Method in Socio-Legal Research, Onati International Series in Law and Society, Cetakan Pertama, Hart Publishing USA

Rimbo Gunawan dkk., 1998., Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat, Kasus Kalimantan Timur, Cetakan Pertama, Yayasan Akatiga, Bandung

Roger Cotterrell., 1998., Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?, Journal of Law and Society Vol.25 No.2, Juni, Blackwell Publisher

Satjipto Rahardjo., 2006., Mompang I. Panggabean (Editor)., Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Cetakan Pertama, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta

-----., 2007., Mendudukan Undang-undang Dasar Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

-----., 2008., Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta

Soedigdo Hardjosoedarmo, 1970, Masalah Tanah di Indonesia : Suatu Studi Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura, Bhratara, Jakarta

Sholih Mu'adi., 2010., Penyelesaian Sengketa hak Atas tanah Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta

uhariningsih, 2005, Studi Terhadap Proses Peralihan dan Pengelolaan HGU Kebun di Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

-----., 2005, Tinjauan Status HGU Tambak Terlantar (Studi Terhadap Tanah Garapan Penduduk di desa Tegalpanggung, Kecamatan Tempusari, Kabupaten Lumajang, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

-----, dkk., 2008., Alternatif Model Pengelolaan Hak Guna Usaha (Perkebunan) Berbasis Landreform dan Corporate Social Responsibility Menuju Reforma Agraria, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing XV-1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No.No.320/SP2H/PP/DP2M/III/2008, Tidak Dipublikasikan, Universitas Brawijaya, Malang